

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian ATR/BPN, Pedoman Pelaksanaan PTSL, Jakarta: Dirjen Hubungan Hukum Pertanahan, 2019.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Kepemilikan Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

#### **PUTUSAN PENGADILAN PRO PATRIA**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/Pdt/2019 tentang Kepemilikan Tanah Absentee (Mahkamah Agung, 2019).

#### **BUKU**

A.P. Parlindungan, Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Adrian, Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Adrian, Sutedi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Adrian, Sutedi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Andi Hamzah, *Aspek Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1993).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, berbagai edisi (2008, 2016, 2018).

Boedi Iskandar, *Hukum Agraria dan Problematika Tanah di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

D. A. Mujiburohman, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Analisis Akademik*.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994).

Gustav Radbruch, *The Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

H. Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cet. ke-12. Jakarta: Djambatan, 2016.

I Ketut Artadi, Hukum Agraria Indonesia: Perspektif Politik Hukum Nasional, Denpasar: Udayana University Press, 2010.

Imam Soetikno, Hukum Pertanahan dalam Perspektif Negara Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2013.

Iman Soetikno, Hukum Agraria: Dalam Perspektif Sejarah, Teori, dan Praktik, (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Iman Sudyat, Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Ismail, Nurhasan. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Ismail, Nurhasan. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

J. Andy Hartanto, Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik, Surabaya: LaksBang Justitia, 2019.

J. Satrio, Hukum Pembuktian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta/Yogyakarta: Kompas & Gadjah Mada University Press, berbagai edisi (2001, 2008, 2009, 2014).

Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2008 & 2014.

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria, Malang: UB Press, 2011.

Nurhasan Ismail, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Parlindungan, A.P. Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Rachmadi Usman, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Rocky W. Felix dkk., Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti (Kajian Hukum Normatif).

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2015.

Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2013.

Santoso, Urip. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Santoso, Urip. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006).

Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Sukirno, Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Teori dan Praktik, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.

Supriadi, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Sutedi Adrian, Hukum Agraria: Implementasi dan Relevansi terhadap Pembangunan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutedi Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syahrani, Pokok-Pokok Hukum Agraria, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana/Prenada Media, berbagai edisi (2012, 2016).

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2019.

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

**JURNAL ILMIAH**

Bambang Susanto, “Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah *Absentee* dalam Perspektif Reforma Agraria,” *Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Vol. 5 No. 1 (2021): 44–57.

Desi Mulyani, “Problematika Sertifikasi Tanah *Absentee* dalam Program PTSL,” *Jurnal Hukum IUS CONSTITUTUM*, Vol. 7 No. 2 (2020): 218–223.

Erwiningsih, M., “Aspek Hukum Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 3 (2013): 410–426.

I Wayan Ruspendi Junaedi, “Implementasi Larangan Pemilikan Tanah *Absentee* dalam Perspektif Reforma Agraria,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3 (2019): 401–420.

*Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8 No. 2 (2020), “Analisis Keabsahan Sertipikat Tanah *Absentee* dalam Program PTSL,” hlm. 63–64.

Ni Luh Putu Shinta Saraswati, “Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah *Absentee* dalam Program PTSL,” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Patrika*, Vol. 45 No. 2 (2021): 78.

Siti Mariam, “Implementasi PTSL dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021): 457.

Tarmizi, “Analisis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2 (2023): 75.

Yovita Arie Mangesti dan Maria S.W. Sumardjono, “Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan PTSL,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1 (2022): 98.

## TESIS

Dian Hildani Bariqoh, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Dibebani BPHTB Terutang*, Tesis, Universitas Jember, 2021.

Masdiana Afrisna, *Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Absentee dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Priasti Nuradini, *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Tanah Berstatus Absentee*, Universitas Diponegoro, 2023.